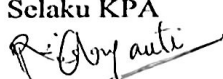


No	KEGIATAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
I	PRA PELAKSANAAN												
	- SK Kegiatan												
	- ATK Kegiatan												
II	PELAKSANAAN												
	- Rapat Koordinasi Advokasi KIE Kespro Provinsi												
	- Rapat Koordinasi Advokasi KIE Kespro Kab Kota												
	- Rapat Koordinasi Program KKBPK												
III	EVALUASI												
	- Monev pelaksanaan kegiatan												
	- Penyusunan laporan akhir												


3. Biaya Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE KB) dibebankan pada DPA-OPD Dinas Pengendalian Penduduk, KB & Dukcapil Provinsi Sumatera Barat TA 2020 pada rekening kegiatan : 1.02.08.1.02.08.01.015.008, dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).-


KEPALA BIDANG KB &
KESEJAHTERAAN KELUARGA
Selaku KPA


ROZA ARIYANTI, S.Si, MT
Pembina TK I
NIP. 19700331 199701 2 001

Padang, Januari 2020
KASI PEMBINAAN PELAYANAN KB
Selaku Pelaksana Kegiatan


ERMAYANTI YULIA, BA
Penata Tk I
NIP. 19670706 199412 2 001

KEPALA DINAS PPKBKPS
PROVINSI SUMATERA BARAT
Selaku PA


IRWAN, S.Sos MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196415 198902 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KIE KKBPK)
TAHUN 2020**

Unit Organisasi	: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar
Program	: Keluarga Berencana
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya Koordinasi Program KKBPK di Sumatera Barat
Kegiatan	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KIE KKBPK)
Indikator Kinerja Kegiatan	: a. Fasilitasi Rapat Program KKBPK. b. Fasilitasi Rapat Advokasi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja.
Keluaran (Output)	: Terlaksananya Rapat Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya Rapat Program KKBPK
Kelompok Sasaran	: OPD Terkait PPKB Kab./Kota, dan OPD terkait Provinsi

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019
- f. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019

Pencapaian Keluaran

NO	KEGIATAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
I	PERSIAPAN												
	- Persiapan Adminstrasi (SK dan KAK)												
	- ATK Kegiatan												
	- Rapat persiapan kegiatan												
II	PELAKSANAAN												
	- Permintaan Nama ASN usulan												
	- Pembuatan Panduan, Indikator Penilaian, SK Tim Penilaian												
	- Sosialisasi Pemilihan ASN KK Model KKBPK												
	- Penyeleksian Administrasi ASN												
	- Rapat Tim Penilai												
	- Penilaian 7 Nominasi (wawancara)												
	- Penilaian ke Lapangan												
	- Rapat Tim penilai (penetapan pemenang)												
	- Penetapan Pemenang												
	- Pembekalan ASN KK Model												

a. Biaya yang Diperlukan


Pelaksanaan kegiatan Pemilihan ASN Model Program KKBPK yang anggarannya teralokasi pada DPA-SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening. 1.02.08.1.02.08.01.023.005 dengan jumlah anggaran Rp 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .

Padang, Januari 2020


KASI PEMBINAAN PELAYANAN KB
Selaku Pelaksana Kegiatan

KEPALA BIDANG KB &
KESEJAHTERAAN KELUARGA
Selaku KPA


ROZA ARIYANTI, S.Si, MT
Pembina TK I
NIP. 19700331 199701 2 001


ERMAYANTI YULIA, BA
Penata Tk I
NIP. 19670706 199412 2 001

KEPALA DINAS PPKBKPS
PROVINSI SUMATERA BARAT
Selaku PA


IRWAN, S.Sos MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196415 198902 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA
PEMILIHAN ASN MODEL PROGRAM KKBPK
TAHUN ANGGARAN 2020**

Unit Organisasi	: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Program	: Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Hasil Kegiatan	: Tersosialisasinya Program KKBPK oleh ASN KK Model (Duta ASIK)
Kegiatan	: Pemilihan ASN Model Program KKBPK
Indikator Kinerja Kegiatan	: Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Sumatera Barat
Keluaran (Output)	: Penilaian ASN Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemenang ASN KK Model Program KKBPK (Duta ASIK)
Kelompok Sasaran	: ASN Golongan II/I , III dan IV OPD Provinsi Sumatera Barat

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019
- g. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019

2. Gambaran Umum.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan serta mengandung kemampuan fisik –materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.

Pembangunan Ketahanan Keluarga dimulai dari anggota keluarga itu sendiri. Oleh karena itu anggota keluarga atas dasar kesadaran dan tanggungjawabnya berkewajiban mengembangkan kualitas dan fungsi keluarga yang dilaksanakan melalui upaya